



**PANDANGAN
FRAKSI PARTAI KADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
KETERANGAN PEMERINTAH ATAS KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021**

Disampaikan oleh: H. Ecky Awal Mucharam
Nomor Anggota: A-430

Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPR RI
Jakarta, 15 Juni 2020

PANDANGAN
FRAKSI PARTAI KeadILAN SeJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
KETERANGAN PEMERINTAH ATAS KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

Disampaikan oleh: H. Ecky Awal Mucharam

Nomor Anggota: A-430

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudari Menteri Keuangan beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan semesta alam, pemilik kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Sehubungan masih dalam suasana bulan Syawal, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengucapkan: Taqaballahumina Waminkum, Taqaball Ya Kariim, Minal A'idin Walfaidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Selanjutnya terkait dengan Pandemi Covid-19 yang sedang kita hadapi bersama, Fraksi PKS mengucapkan berjuta terima kasih kepada Tenaga Kesehatan dan semua Putra-Putri terbaik bangsa yang telah berjuang digarda depan mempertaruhkan nyawa, bergotong-royong, dan bertungkus lumus menghadapi Pandemi Covid-19. Fraksi PKS juga turut mendoakan dan mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada para pahlawan kemanusiaan yang gugur dalam tugas penanganan Pandemi Covid-19. Fraksi PKS mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus bergotong royong menghadapi masa pandemi ini. Serta tidak lupa mari

bermunajat kepada Allah SWT agar bangsa Indonesia diberikan kekuatan dan kesabaran serta kemampuan untuk melewati semua kesulitan dan ujian, sehingga kelak bangsa Indonesia menjadi salah satu bangsa yang unggul dan memberikan manfaat kebaikan kepada umat manusia di muka bumi ini.

Selanjutnya, dalam menyikapi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) Tahun 2021 yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR pada Rapat Paripurna DPR-RI Tanggal 12 Mei 2020, Fraksi PKS mengingatkan bahwa hasil pembahasan KEM-PPKF Tahun 2021 akan menjadi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2021 sehingga harus benar-benar dicermati arah politik anggaran negara yang ada didalamnya. Politik anggaran negara sangat penting untuk memastikan bahwa APBN ke depan disusun secara kredibel dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi di tengah tantangan Pandemi Covid-19 dan kondisi resesi ekonomi global.

Selain itu, pandemi Covid-19 memberikan tantangan baru terhadap kondisi ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan ke pertahanan dan keamanan negara. Di bidang kesehatan, ribuan jiwa terkonfirmasi Covid-19 dan ribuan yang meninggal. Di bidang ekonomi, Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi baik di sisi *supply* maupun *demand*, meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja dan jumlah pengangguran, serta meningkatnya jumlah rakyat miskin. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa Pemulihan ekonomi nasional dapat efektif dan signifikan berhasil ketika Penanganan krisis kesehatan telah dilalui. Fraksi PKS juga mengingatkan Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat dan tidak membingungkan rakyat.

Secara umum Fraksi PKS memandang bahwa dalam KEM dan PPKF Tahun 2021 masih membutuhkan penajaman kebijakan dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19, mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1. Fraksi PKS memandang Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 perlu didesain lebih kredibel untuk memberikan dampak yang lebih optimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sehingga sila ke-5 Pancasila, "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dapat terwujud. Fraksi PKS memberikan pandangan-pandangan sebagai berikut:

Kerangka Ekonomi Makro

1. Fraksi PKS berpandangan bahwa penetapan target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 harus kredibel, konsisten dan agar dapat menjadi acuan bersama ke depan. Dalam kondisi ekonomi normal saja, selama ini realisasi pertumbuhan ekonomi gagal dicapai. Kredibilitas target pertumbuhan yang ditetapkan sangat penting karena akan berpengaruh pada target dan indikator yang lain. Selain itu sangat penting agar pemerintah meningkatkan kualitas pertumbuhan sehingga berdampak lebih baik pada penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Fraksi PKS juga mengingatkan kepada pemerintah untuk fokus pada pencapaian target-target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, sebagai upaya menghindari kegagalan yang sama pada RPJMN 2015-2019. Terlebih ditengah krisis pandemi Covid-19, rakyat membutuhkan kerja keras pemerintah. Beberapa target penting yang harus menjadi perhatian sepanjang 2020-2024 adalah pertumbuhan ekonomi (5,4-6 persen); inflasi (1,5-3,5 persen); investasi (5,9-7 persen); *tax ratio* (10,8-11,7 persen dari PDB); tingkat kemiskinan (6,5-7 persen); tingkat pengangguran terbuka (4-4,6 persen); rasio gini (0,37-0,374) dan IPM (75,54 pada 2024).
2. Fraksi PKS mendorong agar kebijakan-kebijakan pemerintah harus tepat sasaran, agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada 2020, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional meningkatkan defisit APBN dari 5,07 persen menjadi 6,34 persen dari APBN. Dengan dana tersebut, Fraksi PKS meminta pemerintah dapat menstimulus *aggregate demand* (AD) dan *aggregate supply* (AS). Stimulus *aggregate demand* dan *aggregate supply* harus menggerakkan sektor riil dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan. Fraksi PKS juga mengingatkan dan mendesak Pemerintah agar menyiapkan tata kelola dan mitigasi untuk mencegah *Moral Hazard* serta penyalahgunaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
3. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk mampu mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan. Karena, selama ini, pemerintah selalu gagal mencapai target tersebut. Tahun 2019 lalu, ekonomi hanya tumbuh 5,02 persen dari target 5,3 persen. Tahun 2018, realisasi pertumbuhan hanya 5,17 persen; sedangkan target 5,4 persen. Pemerintah cenderung menyalahkan faktor gejolak ekonomi global. Sebagaimana diketahui porsi ekonomi global dalam struktur PDB Indonesia tidaklah signifikan. Peranan ekspor dan impor masing-masing di bawah 20 persen. Kegagalan mencapai

pertumbuhan ekonomi berdampak pada kegagalan mencapai target penerimaan negara maupun percepatan penurunan masalah-masalah sosial di Indonesia.

4. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global tahun 2021. Beberapa di antaranya adalah: (i) moderasi pertumbuhan ekonomi (melebarnya antara target dan realisasi); (ii) perdagangan dunia belum pulih karena covid-19 melumpuhkan sisi produksi, distribusi, hingga konsumsi (iii) meluasnya konflik antara Amerika Serikat dan China serta Australia dan China terkait dengan rekomendasi investigasi covid-19; serta konflik rasis di Amerika Serikat (iv) pergerakan harga komoditas dunia yang belum normal dan cenderung menurun; (v) suku bunga acuan beberapa bank sentral ditahan rendah, sehingga aliran modal jangka pendek ke Indonesia cenderung deras. Hal ini akan menggoncang Rupiah jika terjadi *sudden reversal*; (v) investasi global yang masih menurun, sehingga investasi ke Indonesia cenderung menurun. Apalagi iklim investasi belum membaik.

Fraksi PKS mendesak pemerintah merinci target pertumbuhan sisi permintaan yang lebih rinci. Pada dokumen KEM PPKF Tahun 2021, tidak dirinci pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Padahal, perlu disampaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara individu untuk memberikan gambaran kemampuan perekonomian mencapai target pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi sekitar 56 persen. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan LNPRT, pemerintah menetapkan target 4,1-4,9 persen pada 2021. Fraksi PKS menilai pemerintah tidak sungguh-sungguh berupaya mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Kondisi ini terlihat dari rendahnya target pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan LNPRT.

5. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah untuk fokus kepada kekuatan ekonomi domestik karena ekonomi global yang belum pulih dari dampak Covid-19. Namun demikian, tidak berarti pemerintah tidak dapat memanfaatkan situasi ekonomi global yang dalam masa pemulihan. Dalam kaitannya dengan kekuatan ekonomi domestik, pemerintah sudah seharusnya melindungi daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan berbagai harga barang-barang yang diaturnya (*administered price*). Kenaikan iuran BPJS menjadi catatan buruk bagi Pemerintah karena dilakukan saat ekonomi masyarakat terpuruk. Lewat Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah menaikkan iuran BPJS, yang akan berlaku sejak 1 Juli 2020. Kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per orang (naik 85 persen); kelas ii naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per orang (naik 96 persen) dan kelas iii naik dari Rp25 ribu menjadi Rp42

ribu (64 persen). Selain itu, pemerintah pun menambah beban rakyat dengan Peraturan Pemerintah tentang TAPERA, yang memotong gaji bulanan pekerja hingga 2,5 persen.

Fraksi PKS berpandangan bahwa pemerintah seharusnya mengikuti rekomendasi KPK terkait dengan pengelolaan BPJS Kesehatan. Adapun rekomendasi KPK tersebut adalah (i) pemerintah agar menyelesaikan pedoman nasional praktik kedokteran (PNPK); (ii) melakukan penertiban kelas rumah sakit; (iii) mengimplementasikan kebijakan urun biaya (*co-payment*) untuk peserta mandiri sebagaimana diatur dalam Permenkes 51 Tahun 2018 tentang urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan; (iv) menerapkan kebijakan pembatasan manfaat untuk klaim atas penyakit katastropik; (v) mengakselerasi implementasi kebijakan *coordination of benefit* (COB) dengan asuransi kesehatan swasta; dan (vi) mengaitkan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan pelayanan publik.

6. Fraksi PKS berpandangan bahwa tantangan mengelola konsumsi rumah tangga semakin sulit ke depan. Pelemahan daya beli melanda seluruh lapisan kelompok rumah tangga. Pada masyarakat kelompok rumah tangga pendapatan terendah, ekonominya lumpuh karena sebagian besar bergantung pada pendapatan harian. Rata-rata masyarakat tersebut bekerja di sektor informal. Kelompok masyarakat tersebut akan sulit bangkit untuk memulai usaha, karena tidak tersedianya modal. Fraksi PKS mendesak agar muncul kebijakan jaring pengaman untuk menjangkau dan memberi harapan bagi pelaku usaha informal. Jumlah masyarakat tersebut pun cenderung meningkat karena lonjakan PHK dari sektor formal. Pada kelompok menengah, kondisi yang terjadi adalah kecenderungan menghemat belanja dan meningkatkan tabungan. Hal itu tergambar dari penurunan berbagai indikator konsumsi. Salah satunya adalah pertumbuhan retail tahun 2020 hanya 3-4 persen turun dari 8,5 persen pada tahun lalu. Penurunan penjualan retail turun signifikan di masa Ramadhan-Idul Fitri mencapai 40-50 persen. Hal tersebut disebabkan oleh hilangnya aksi pembelian tidak terencana (*impulse buying*) karena kebijakan PSBB dan berkurangnya nilai transaksi (*basket size*) terutama dari kelas menengah. Konsumsi masyarakat terdorong ke kebutuhan primer terutama pangan, yang seharusnya dapat mendorong perbaikan kesejahteraan petani. Pembelian kebutuhan sekunder relatif rendah. Kelompok berpenghasilan tertinggi juga tidak berbelanja besar, baik untuk liburan maupun *fashion*.

Fraksi PKS berpandangan bahwa target pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 2,5-3,5 persen terlalu rendah. Dalam kondisi pemulihan krisis, pertumbuhan konsumsi rumah tangga seharusnya didorong bisa lebih tinggi sebagai upaya untuk mengurangi

dampak terperosoknya ekonomi ke krisis yang lebih dalam. Dengan defisit APBN yang sudah di atas 3 persen pada 2020 dan 2021, sudah selayaknya konsumsi rumah tangga bisa tumbuh di atas 5 persen. Jika tidak demikian maka perlu dipertanyakan ketepatan belanja APBN dan kualitas eksekusinya.

7. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sektor industri di antaranya ketersediaan bahan baku (kondensat, gas, naphta, biji besi); minim dan buruknya ketersediaan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri); kekurangan utilitas (listrik, air, gas, dan pengolahan limbah); kekurangan tenaga terampil; serbuan produk impor; masalah pembiayaan (khususnya pada industri kecil dan menengah). Hingga triwulan I-2020, kontribusi industri pengolahan di bawah 20 persen dari PDB dan hanya tumbuh 2,06 persen (yoy). Sementara itu, industri pengolahan menyerap hingga 18,5 juta tenaga kerja atau 14 persen dari tenaga kerja nasional.

Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk konsisten mendukung sektor industri karena peranannya yang sangat besar bagi PDB, penyerapan tenaga kerja, hingga ekspor. Salah satu langkahnya adalah penurunan harga gas menjadi US\$6 per mmbtu. Hal itu sejalan dengan PERPRES No. 40 tahun 2016. Untuk mencapai harga tersebut, maka harga gas di hulu harus turun antara US\$4-4,5 per mmbtu dan biaya transportasi dan distribusi diturunkan antara US\$1-1,5 per mmbtu. Beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menurunkan harga gas beberapa di antaranya adalah: (i) mengurangi atau menghilangkan porsi pemerintah dari kontraktor kerja sama (K3S) sebesar US\$2 per mmbtu; dan (ii) mewajibkan kontraktor gas untuk melakukan *Domestic Market Obligation* (DMO) kepada Perusahaan Gas Negara (PGN). Dengan demikian ada jaminan alokasi gas dengan harga spot saat ini di level US\$ 4,5 per mmbtu. Dengan penurunan harga gas maka produktivitas industri bisa naik hingga 30 persen.

8. Fraksi PKS menilai bahwa target pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6-7,1 persen cukup tinggi. Perkembangan ekonomi dunia menjadi tantangan utama bagi realisasi penanaman modal. Negara-negara di dunia akan mengerem investasinya ke negara lain untuk memaksimalkan investasi di dalam negeri. Menurut United Nations Trade and Development (UNTAD) menjelaskan bahwa FDI perusahaan-perusahaan multinasional akan turun sekitar 30-40 persen pada 2020-2021. Masalah yang dihadapi sejalan dengan tingginya kebergantungan ekonomi dunia terhadap China, terutama untuk bahan baku industri. Sementara itu, realisasi penanaman modal pada triwulan i-2020 tumbuh 8 persen (yoy) atau 1,2 persen (qtq). Penanaman modal dalam negeri (PMDN) tumbuh 29 persen (yoy) sedangkan

penanaman modal asing (PMA) turun 9 persen (yoy). Fraksi PKS melihat bahwa pertumbuhan penanaman modal yang belum membaik menjadi kendala bagi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ke depan. Hal ini dikarenakan, porsi PMTB mencapai 32 persen terhadap PDB.

Fraksi PKS mengkritisi target pertumbuhan tahun 2021 sulit tercapai karena minimnya realisasi penanaman modal pada sektor padat karya. Pada PDMN, sektor sekunder hanya menyerap 17 persen dari total investasi sedangkan pada sektor tersier mencapai 68 persen. Pada PMA, sektor sekunder menyerap 45 persen dan tersier 40 persen. Pada triwulan I-2020, realisasi PMDN pada industri padat karya (makanan, tekstil & pakian jadi, serta kulit & barang kulit) hanya Rp7,3 miliar atau 6,5 persen dari total. Angka tersebut menciptakan 1.371 proyek. Pada PMA, realisasi pada industri padat karya hanya US\$415 juta atau 0,3 persen dari total; dengan proyek 1.182.

9. Fraksi PKS berpandangan sebaiknya pemerintah menarik RUU Omnibus Cipta Kerja karena bertentangan semangat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak untuk memperoleh pekerjaan. Undang-Undang Dasar sudah mengatur hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan, sehingga negara wajib memenuhinya. Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". RUU Law Cipta Kerja memuat berbagai aturan yang mencederai semangat yang diusung oleh UUD 1945. RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tujuan awal dari pembentukan RUU tersebut adalah untuk menarik investasi sebagai syarat penyerapan tenaga kerja. Untuk menarik investasi maka pemerintah merevisi sekitar 79 undang-undang, sebagai langkah merampingkan perundang-undangan. Akan tetapi, resep yang ditawarkan oleh RUU Cipta Kerja justru kontra produktif (bahkan cenderung destruktif terhadap perekonomian), sehingga memunculkan berbagai penolakan yang pada akhirnya menciptakan instabilitas sosial dan politik baik di pusat maupun di daerah. Dengan situasi yang seperti itu, investor akan mangkir dari Indonesia dan investor baru pun tidak tertarik karena tingginya '*country risk and political risk*' di Indonesia.

Fraksi PKS menilai bahwa RUU Cipta Kerja salah sasaran, jika persoalan yang akan diperbaiki adalah investasi. Dalam berbagai rilis daya saing Indonesia, persoalan utama yang dihadapi Indonesia adalah korupsi. Hal itu, misalnya, dapat dilihat dari rilis *World Economic Forum* (WEF) pada beberapa rilis. Persoalan kedua adalah ketidakefisienan birokrasi pemerintah. Hal ketiga adalah masalah akses keuangan, disusul masalah infrastruktur. Sementara itu masalah yang terkait dengan buruh

berada pada urutan ke delapan, pendidikan tenaga kerja pada peringkat 11, peraturan tenaga kerja pada urutan ke 13. WEF merinci 16 masalah utama daya saing investasi suatu negara.

10. Fraksi PKS mendesak pemerintah mengantisipasi gejolak ekonomi global yang menekan kinerja neraca perdagangan Indonesia. Sepanjang Januari-April 2020, neraca perdagangan Indonesia memang surplus namun bukan karena perbaikan fundamental ekspor maupun impor. Nilai ekspor hanya tumbuh 3,19 persen (yoy) sedangkan impor turun 7,25 persen (yoy). Sementara itu, volume ekspor turun 6,5 persen (yoy). Nilai impor turun sekitar 7,2 persen (yoy). Untuk mengantisipasi pemburukan neraca perdagangan, Pemerintah harus sigap mencari pasar baru ekspor di luar negara-negara tradisional. Selain itu, implementasi stimulus non-fiskal segera dilakukan.

Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan besar terhadap komoditas ekspor utama Indonesia dan secara bertahap meningkatkan hilirisasi produk. Harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti CPO yang terus menghadapi penolakan dari negara lain. Selain menyumbang devisa, perkebunan CPO menyerap tenaga kerja signifikan sehingga menjadi komoditas penting bagi Indonesia. Tantangan CPO cukup berat ke depan, karena penyebaran covid-19 menyebabkan permintaan lemak dan minyak nabati cenderung menurun seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, hingga minyak kanola. Semua produk memperebutkan pasar yang semakin menciut. Dalam kaitannya dengan hilirisasi CPO berupa B30, target 9,6 juta kiloliter selama 2020 tidak akan tercapai.

Fraksi PKS mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan ekspor karena berperan signifikan terhadap berbagai indikator ekonomi lainnya. Beberapa di antaranya adalah akumulasi cadangan devisa yang menjadi amunisi untuk memenuhi kebutuhan pembayaran utang pemerintah dan swasta; impor dan intervensi kebijakan moneter. Selain itu, valuta asing dari ekspor juga menjadi indikator *Debt Service Ratio* (DSR). DSR merupakan jumlah beban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang yang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor. DSR mencerminkan yang mengukur kemampuan suatu negara dalam membayar utang. Menurut data Bank Indonesia, DSR Indonesia mencapai 27,65 persen pada triwulan i-2020; jauh meningkat dari 18 persen pada triwulan sebelumnya.

Fraksi PKS mengingatkan pemerintah memperhatikan penurunan impor bahan baku/penolong dan barang modal industri yang cukup signifikan. Menurut BPS, impor

bahan baku/penolong turun 7,3 persen (yoy) dan impor barang modal turun 14 persen (yoy). Hal ini sangat dikhawatirkan karena menunjukkan sinyal industri pengolahan yang semakin terpuruk. Kondisi tersebut dikonfirmasi laporan IHS Markit terkait dengan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang pada April 2020 menyentuh level terendah dalam sejarah, hanya 27,5.

11. Fraksi PKS meminta agar Pemerintah mengarahkan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mencapai target inflasi. Kebijakan pemerintah harus dapat memastikan ketersediaan pangan pokok untuk menekan inflasi bergejolak (*volatile food inflation*). Selain itu, Bank Indonesia harus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap US\$ agar inflasi dari impor (*imported inflation*) dapat ditekan. Fraksi PKS melihat tekanan inflasi akan tinggi pada 2021 karena lonjakan jumlah uang beredar sebagai dampak stimulus pemerintah. Kondisi ini akan menaikkan inflasi inti. Sementara itu, inflasi bahan pangan berpotensi terus melambung. Pada April 2020, inflasi inti mencapai 2,85 persen (yoy). Fraksi PKS kembali menegaskan bahwa angka inflasi yang relatif rendah bukan sesuatu yang menggembirakan karena pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah. Justru, inflasi yang mencapai 2,67 persen sangat tinggi untuk pertumbuhan ekonomi hanya 2,97 persen. Dengan inflasi tersebut, ekonomi rumah tangga semakin terpukul. Sementara itu pada RPJMN 2019-2024, inflasi ditetapkan sekitar 3 ± 1 persen pada 2020-2022 dan $2,5 \pm 1$ persen pada 2023-2024.

Fraksi PKS mendorong pemerintah menambah data acuan inflasi berupa inflasi bahan makanan, bukan hanya inflasi umum (*headline inflation*). Hal tersebut lebih mencerminkan kondisi di Indonesia (*structural*). Pada kenyataannya inflasi bahan pangan biasanya lebih tinggi dari inflasi umum. Dengan menjadikan inflasi bahan pangan menjadi target maka pemerintah tidak dapat berlindung pada pencapaian inflasi umum. Pada April 2020, inflasi umum 2,67 persen sedangkan inflasi bahan pangan mencapai 5,04 persen. Lonjakan harga pangan yang terus meningkat akan mendorong rumah tangga miskin ke dalam kubangan kemiskinan yang lebih dalam. Sekitar 2/3 pendapatan rumah tangga tersebut dialokasikan untuk pemenuhan makanan. Apalagi saat Covid-19 dan hilangnya pekerjaan, menjadikan masalah pemenuhan bahan pangan semakin sulit. Fraksi PKS mendorong agar pemerintah mengelola harga bahan pangan yang telah melambung tinggi. Menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga bawang merah ukuran sedang pada April 2020 naik hingga 17 persen menjadi Rp45.200 per kg; sedangkan gula pasir kualitas premium naik 24 persen (yoy) menjadi Rp18.100 per kg. Sementara itu gula pasir lokal naik hingga 46 persen (yoy) menjadi Rp17.900 per kg.

Fraksi PKS menyoroti rendahnya kenaikan upah petani dibandingkan inflasi (baik inflasi umum maupun inflasi bahan makanan). Jadi, inflasi yang diklaim rendah justru tidak sejalan dengan perbaikan pendapatan di tingkat petani. Pada April 2020, inflasi bahan makanan mencapai 5,04 persen dan inflasi umum 2,67 persen. Sementara itu upah nominal hanya naik 2,53 persen (yoy) dan upah riil turun 1 persen (yoy).

12. Fraksi PKS berpendapat bahwa nilai tukar Rp14.900-15.300 per Dollar terlalu pesimis, yang seharusnya bisa ditetapkan lebih kuat. Hal ini mengelola ekspektasi positif dari pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Realisasi Rupiah terhadap US\$ sekitar Rp14.700 pada akhir Mei. Sementara itu, sepanjang April, Rupiah terdepresiasi hampir pada seluruh mata uang utama dunia. Hanya pada Dollar Australia yang terapresiasi sekitar 1,03 persen (yoy). Depresiasi tertinggi terjadi pada Swiss Franc mencapai 11 persen (yoy). Fraksi PKS mendorong Bank Indonesia untuk dapat menjaga Rupiah karena kondisi ekonomi global yang belum pulih hingga 2021. Beberapa faktor yang berpotensi menekan Rupiah adalah pemburukan hubungan China dan AS, tensi politik di AS yang ditandai dengan berbagai kerusuhan. Dari sisi domestik, masalah yang akan memengaruhi Rupiah seperti kredibilitas pemerintah dalam menyelesaikan covid-19. Selain itu, *credit default swap* (CDS) Indonesia terus meningkat, dan sempat mencapai level 245 pada saat krisis Covid-19 terjadi.

Fraksi PKS menilai bahwa persoalan nilai tukar tidak hanya menjadi area moneter tetapi juga masalah kredibilitas pemerintah. Pada saat Covid-19 mulai muncul di Indonesia, pelaku pasar menghukum Indonesia lewat depresiasi Rupiah. Hal ini disebabkan oleh buruknya pengelolaan krisis di Indonesia, bahkan menganggap remeh Covid-19. Investor meninggalkan pasar Indonesia baik dari pasar saham maupun obligasi. Rupiah hampir menembus Rp17.000 per US\$. Situasi tersebut berdampak buruk terhadap pembayaran bunga utang pemerintah dan swasta maupun impor bahan baku/ penolong industri.

13. Fraksi PKS berpendapat agar pemerintah menetapkan suku bunga SBN 10 tahun lebih rendah karena terkait langsung dengan beban APBN ke depan. Porsi belanja cicilan bunga utang lebih dari 15 persen terhadap belanja pemerintah pusat. Sementara itu, porsi belanja bunga utang mencapai 20 persen dari pendapatan negara pada 2020, naik dari tahun 2019 sebesar 14,41 persen. Jika dibandingkan terhadap PDB, cicilan bunga utang mencapai 2 persen pada 2020. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menekan *yield* SBN lebih rendah dari target 6,67-9,56 persen. Pemerintah harus memperbaiki kondisi fiskal agar *yield* SBN dapat turun. *Yield* SBN Indonesia jauh di

atas negara-negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa risiko fiskal Indonesia lebih buruk.

14. Asumsi harga minyak tahun 2021 antara 40 - 50 dollar AS per barel, Fraksi PKS memandang perlu dicermati secara lebih tajam. Banyaknya ketidakpastian dan berbagai faktor seperti faktor geopolitik di negara penghasil minyak, kebijakan pengendalian produksi minyak anggota OPEC, kelanjutan perang dagang antara Amerika dan Cina serta tekanan resesi perekonomian dunia akibat Covid-19 telah menyebabkan fluktuasi harga minyak. Untuk itu, Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk lebih cermat dalam memprediksi harga minyak dunia dan *trend*-nya kedepan, sehingga dapat dilakukan perhitungan yang lebih akurat dalam menentukan ICP. Pemerintah juga perlu mengembangkan mekanisme lindung nilai (*hedging*).
15. Terkait lifting minyak yang ditargetkan di rentang 677-737 ribu barel per hari secara umum cukup pesimis. Fraksi PKS memandang angka lifting yang cenderung terus menurun tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus melakukan upaya-upaya yang ekstra serius untuk mengatasi penurunan lifting ini. Perlu didorong usaha eksplorasi yg signifikan agar lifting minyak dapat ditingkatkan. Kebijakan Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus memfasilitasi kemudahan regulasi bagi industri minyak untuk melakukan eksplorasi pencarian sumur-sumur minyak baru. Selain itu perlu intensifikasi sumur-sumur yang ada melalui penggunaan teknologi seperti enhanced oil recovery (EOR) dengan tetap memperhatikan aspek keekonomian teknologinya.
16. Lifting Gas sebesar 1.085 – 1.173 ribu barel setara minyak secara umum juga cukup pesimis. Lifting gas seharusnya dapat lebih ditingkatkan lagi. Hal ini karena dari sisi produksi, masih banyak potensi sumber gas di dalam negeri yang dapat dieksploitasi. Selain itu dari sisi pasar, daya serap oleh konsumen dapat lebih ditingkatkan lagi melalui pembangunan infrastruktur pipa gas. Selain akan meningkatkan lifting gas yang ada saat ini, infrastruktur gas ini akan memungkinkan lebih banyak lagi rakyat yang dapat menikmati gas yang merupakan energi bersih dan lebih ramah lingkungan yang diharapkan juga lebih murah.

Target Pembangunan dan Indikator Kesejahteraan

17. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan yang meningkat pada situasi pandemi Covid-19. Pemerintah harus memperkuat Jaring pengaman sosial, stimulus, dan kebijakan ekonomi yang fokus menurunkan tingkat

kemiskinan. Pemerintah harus bekerja keras agar tidak terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin. Pemerintah perlu mengatasi peningkatan pengangguran diseluruh provinsi karena itu salah satu faktor yang menyebabkan angka kemiskinan naik. Fraksi PKS menilai bahwa kinerja pengurangan angka kemiskinan di era Pemerintahan Jokowi masih jauh dari memuaskan. Pengurangan kemiskinan secara umum mengalami perlambatan: dimana pada periode 2009-2014 setiap tahunnya kemiskinan rata-rata berkurang 0,58 persen, sedangkan pada era Pemerintahan Jokowi hanya berkurang 0,26 persen per tahun. Fraksi PKS memandang penurunan angka kemiskinan bergerak lebih lambat. Dengan guncangan pandemi Covid-19 kinerja pengurangan kemiskinan pemerintah akan semakin berat, di satu sisi harus memperbaiki angka ketertinggalan kemiskinan rata-rata per tahun, disisi lain mengatasi melonjaknya angka kemiskinan akibat Pandemi Covid-19. Selain itu juga diperlukan peningkatan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan yang berkesinambungan. Pemerintah mesti fokus pada penciptaan lapangan kerja agar menyelesaikan akar masalah kemiskinan khususnya di pedesaan. Hal ini mengingat masih tingginya persentase penduduk miskin di pedesaan.

18. Dengan meledaknya angka pengangguran Fraksi PKS menekankan kepada pemerintah agar menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2021 dengan berbagai upaya serius pemerintah untuk mencapainya. Ada permasalahan penurunan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektor-sektor penyerap tenaga kerja yang semakin melambat. Pada triwulan I-2020, pertumbuhan ekonomi hanya 2,97 persen. Pertumbuhan industri pengolahan hanya 2,03 persen dan menjadi yang terendah dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pertumbuhan investasi melambat, hanya 1,7 persen (yoy). Pemerintah perlu berupaya memperbaiki kualitas ketenagakerjaan Indonesia yang mengalami sedikit penurunan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi mencapai lebih dari 9 persen, sedangkan pada beberapa tahun terakhir hanya sekitar 7 persen. Selain itu, Pemerintah perlu melihat fenomena semakin besarnya proporsi anak muda yang bekerja di bawah 15 jam satu minggu. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja muda di Indonesia masih kesulitan mendapatkan pekerjaan penuh (di atas 35 jam per minggu). Program pelatihan pra-kerja perlu banyak perbaikan, mengingat selama ini pelatihan pra-kerja terlihat hanya berorientasi pada kuantitas bukan kualitas.
19. Pemerintah harus berupaya maksimal mencapai tingkat pengangguran yang ditargetkan di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi yang melemah. Kegiatan

ekonomi sebagian besar bergerak pada sektor informal. Menurut data sektoral, pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja tertinggi, di tengah-tengah penurunan kinerja terutama karena maraknya konversi lahan ke aktivitas nonproduktif. Selain itu, penyerapan tenaga kerja masih didominasi pendidikan rendah (SMP ke bawah). Lulusan SMK sulit terserap pasar tenaga kerja, padahal sebagian besar lulusan SMK berasal dari keluarga tidak mampu, yang tidak menjangkau bangku perkuliahan. Tantangan menurunkan TPT semakin berat karena menurunnya peranan sektor padat karya, terutama melemahnya kinerja industri pengolahan. Peranannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada pada angka 19,62 persen; dengan pertumbuhan di 4,68 persen atau lebih lambat dibandingkan tahun 2018 yang mampu tumbuh di atas 5 persen. Industri andalan ini pun tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena melemahnya denyut ekonomi efek pandemi Covid-19 juga kuatnya penetrasi industri 4.0, akan sangat sulit menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah.

20. Terkait target gini ratio, Fraksi PKS mendorong Pemerintahan untuk lebih proaktif dan progresif dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik untuk mengatasi ketimpangan. Berdasarkan koefisien Gini, ketimpangan di Indonesia masih stagnan pada angka 0,380. Sedikit mengalami penurunan dari 0,382 atau sebanyak 0,002 poin. Perbaikan gini rasio lebih disebabkan meningkatnya konsumsi kalangan menengah dibandingkan perbaikan konsumsi kalangan bawah. Selain itu, berdasarkan sejumlah penelitian, kualitas pertumbuhan Indonesia mengalami penurunan dan hal ini menyebabkan stagnannya koefisien gini. Pada era Pemerintahan sebelumnya, setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen, maka konsumsi masyarakat 20 persen termiskin akan tumbuh mencapai hampir 1 persen, sedangkan pada era Pemerintahan Jokowi hanya tumbuh 0,7 persen. Hal ini seharusnya menjadi catatan serius untuk kebijakan Pemerintah ke depan.
21. Fraksi PKS menilai target Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 menjadi sebesar 72,78 - 72,90 menunjukkan pesimisme untuk dapat meningkatkan IPM secara signifikan. Perlu diingat bahwa Pemerintah perlu mengejar target IPM pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 75,54. Pemerintah harus lebih serius dalam mengevaluasi dan memperbaiki kegagalan pencapaian tersebut. Selain itu, Pemerintah harus mampu memperbaiki kondisi sosial di daerah-daerah tertinggal. Pemerintah harus menjaga dan meningkatkan efektivitas dana desa, jangkauan listrik, jangkauan keuangan (*financial inclusion*), serta

mendorong realisasi penanaman modal. Selain itu, pemerintah harus mempercepat perbaikan IPM di daerah-daerah yang memiliki IPM di bawah nasional. Fraksi PKS berpendapat bahwa Pemerintah harus bekerja lebih keras guna merealisasikan target IPM. Sejumlah indikator daya saing menunjukkan bahwa kondisi pendidikan dasar dan kesehatan di Indonesia belum mengalami banyak perbaikan selama empat tahun terakhir. Berdasarkan rilis World Economic Forum, *Global Competitiveness Index*, indikator *health and primary education* mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Begitupun indikator *entrepreneurial culture* Indonesia pada tahun 2019 mengalami penurunan.

22. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dalam Rilis World Economic Forum (WEF) yaitu Global Competitiveness Index (GCI) 2018-2019 menunjukkan bahwa daya saing Indonesia cenderung tersisih selama lima tahun terakhir, di mana tahun 2015 Indonesia berada pada peringkat 34 dan melorot ke peringkat 45 pada tahun 2018. Bahkan dengan perubahan metode yang memasukkan unsur perkembangan teknologi, WEF dalam laporan Global Competitiveness Report 2019 menempatkan peringkat daya saing Indonesia pada peringkat 50 dari 140 negara. Indonesia jelas kalah jauh dibandingkan negara kawasan seperti Singapura, yang berada pada peringkat pertama dunia dalam indeks daya saing global. Negara tetangga tersebut mencatat skor sangat baik untuk beberapa pilar, antara lain institusi (skor 80), infrastruktur (95), stabilitas makroekonomi (100), pasar tenaga kerja (81), sistem keuangan (91), dan kesehatan (100). Selain itu, dua negara jiran kita juga berada pada peringkat daya saing yang lebih unggul. Malaysia berada pada peringkat 27, sementara Thailand berada pada peringkat 40.

Kebijakan Pendapatan Negara

23. Fraksi PKS memandang Pemerintah perlu menyusun target pendapatan, terutama penerimaan perpajakan yang realistis. Terjadinya shortfall perpajakan pada dasarnya perlu diantisipasi semenjak awal, terlebih masih lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat deindustrialisasi dini dan ketidakpastian perekonomian global. Fraksi PKS menilai bahwa target pendapatan negara masih terlalu optimis. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2019, maka target penerimaan perpajakan pada KEM-PPKF hanya mengalami kontraksi sebesar 0,2 persen. Target pendapatan negara juga, dengan skenario optimis juga akan tumbuh 10 persen dibandingkan target 2020.

Pemerintah harus mengatur target pendapatan ini secara lebih realistis. Sebagai perbandingan, pada tahun 2019, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen saja, penerimaan perpajakan hanya tumbuh sebesar 3,3 persen. Lebih lanjut, pada saat krisis keuangan global 2009, dengan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan di bawah 2 persen saja, penerimaan perpajakan sudah mengalami kontraksi sebesar 5,9 persen. Pemerintah harus berkaca pada kondisi sebelumnya. Terlebih dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 ini diperkirakan lebih besar dari krisis-krisis sebelumnya.

24. Fraksi PKS mengkritisi strategi fiskal yang dilakukan dengan memberikan sejumlah insentif perpajakan untuk dunia usaha, terutama dunia usaha skala besar. Insentif perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah pada tahun 2021 berupa penurunan tarif PPh badan hingga pembebasan PPh 22 impor. Fraksi PKS mengingatkan total belanja perpajakan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah pada periode 2016-2018 mencapai Rp 609 Triliun. Angka tersebut artinya potensi pajak yang hilang akibat adanya pemberian insentif perpajakan. Fraksi PKS berpendapat besarnya dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah belum berbanding lurus dengan tujuan dari insentif pajak tersebut. Tujuan insentif perpajakan adalah mendorong adanya investasi baru pada wilayah ataupun bidang usaha yang cenderung baru (*pionir*), khususnya pada bidang industri manufaktur. Data saat ini justru menunjukkan bahwa investasi asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN) pada periode pemberian insentif untuk sektor industri manufaktur terus mengalami kelesuan. Pada tahun 2014, sektor industri manufaktur berkontribusi terhadap 43% total investasi (PMA dan PMDN) nasional, pada tahun 2019 kontribusi sektor manufaktur pada total investasi hanya sebesar 24,5%. Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa investasi pada sektor industri manufaktur tahun 2019 (Januari-September) justru mengalami penurunan secara nominal. Pada periode tersebut, investasi pada sektor industri manufaktur hanya sebesar Rp147 Triliun, jauh di bawah pada periode yang sama tahun 2014 yang mencapai Rp199 Triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa insentif yang diberikan saat ini justru belum mendorong tujuan dasarnya, yaitu investasi pada sektor industri manufaktur.
25. Fraksi PKS juga mengkritisi strategi fiskal 2021 yang mengandalkan *Omnibus law* bidang fiskal, yang justru banyak diarahkan untuk memberikan penurunan tarif pph badan dan PPh badan *go public*. Selama ini Pemerintah sudah memiliki skema untuk insentif perpajakan, akan tetapi justru insentif tersebut belum dapat mendorong lanju investasi. Perlu menjadi catatan penting, permasalahan utama yang menghambat investasi di Indonesia, terutama pada bidang perpajakan bukan pada tarif pajaknya,

akan tetapi justru pada proses administrasi perpajakannya. Selama ini yang banyak dikeluhkan oleh dunia usaha dan investor adalah proses administrasi perpajakan yang sulit dan kurang transparan. Hal tersebut membuat dunia usaha dan investor enggan untuk menambah kapasitas investasinya. Sejumlah riset telah menyatakan bahwa untuk kasus negara berkembang, pemberian insentif perpajakan tidak efektif untuk mendorong investasi, selama masih ada permasalahan dalam birokrasi dan administrasi perpajakan. Fraksi PKS berpendapat Kebijakan fiskal Pemerintah seharusnya lebih menyentuh pada reformasi mendasar perpajakan Indonesia. Kualitas dan kuantitas tenaga pajak perlu terus ditingkatkan. Kemudahan birokrasi yang diikuti dengan perbaikan administrasi perpajakan seharusnya menjadi kunci utama. Selama Pemerintah masih sibuk mendahulukan besaran tarif perpajakan, dibandingkan perbaikan administrasi perpajakan, maka stagnansi tax ratio masih akan terus terjadi.

26. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk terus menggali potensi perpajakan dari sejumlah sektor yang kontribusi pungutan pajaknya masih under-potential atau lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi PDB-nya. Contohnya sektor konstruksi dan real estate yang kontribusi perpajakannya hanya sebesar 7,2 persen, padahal kontribusi perekonomiannya (kepada PDB) mencapai 14 persen. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk memperbaiki sistem birokrasi perpajakan dan mendorong terciptanya kepastian hukum dalam perpajakan agar menjadi insentif bagi pelaku usaha untuk membayar pajak.
27. Fraksi PKS berpandangan turunnya target PNBPN pada tahun 2021 sesuai dengan kondisi turunnya harga komoditas global. Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk terus mendorong potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum banyak tergali dan mendorong tingkat kepatuhan pembayaran. PNBPN terhadap PDB nasional terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dari 3,8 persen (2014) menjadi hanya 2,7 persen (2018). Pasca disahkan UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBPN, Pemerintah seharusnya dapat melakukan langkah-langkah strategis, terutama dalam perbaikan administrasi dan birokrasi, sehingga dapat mendorong tingkat kepatuhan dan pada akhirnya pertumbuhan PNBPN nasional. Fraksi PKS berpendapat Pemerintah tidak boleh bergantung pada PNBPN SDA yang sangat rentan dengan volatilitas global. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan BMN, BUMN, serta BLU sehingga dapat mendorong penerimaan PNBPN nasional. Pendapatan BLU pada tahun 2019 berkontribusi sebesar 12 persen dari total PNBPN, dan pada tahun 2020 diperkirakan meningkat kontribusinya menjadi 18,9 persen. Tentu potensi tersebut dapat terus dikembangkan.

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat

28. Fraksi PKS berpandangan bahwa kebijakan Belanja Negara tahun 2021 secara umum perlu diarahkan untuk penanganan Pandemi Covid-19, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengatasi ketimpangan, serta mendorong pemerataan ekonomi. Perlu menjadi perhatian pemerintah bahwa Pemulihan ekonomi tidak akan dapat terjadi dengan signifikan tanpa perbaikan di sektor kesehatan. Secara khusus arah kebijakan belanja negara Tahun Anggaran 2021 masih perlu diprioritaskan termasuk penguatan di pelbagai sektor Kesehatan dan bidang ekonomi. Arah kebijakan ekonomi yang perlu untuk dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mengatasi Pandemi Covid-19 yaitu untuk mencegah penurunan Kesehatan dan penurunan ekonomi yang terlalu besar. Alokasi belanja yang bersentuhan langsung kepada rakyat kecil perlu mendapat alokasi yang lebih signifikan. Hal ini sangat penting mengingat masih tertekannya daya beli rakyat akibat pandemi Covid-19. Pemerintah juga perlu benar-benar mengawasi industri yang mendompleng sakit karena Pandemi Covid-19 untuk tujuan mendapatkan fasilitas atau insentif dari belanja negara. Secara umum, Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah agar Program Pemulihan Ekonomi Nasional dapat digunakan dengan tepat sasaran dan tepat tujuan. Pemerintah harus menyiapkan tata kelola dan mitigasi agar tidak terjadi *moral hazard* dan penyalahgunaan.
29. Fraksi PKS berpendapat agar Kebijakan alokasi anggaran ke depan perlu lebih progresif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperbaiki pemerataan kesejahteraan. Efisiensi belanja bukan prioritas Pusat berupa penghematan belanja barang non operasional seperti perjalanan dinas, paket-paket meeting dan seterusnya. Selain itu realokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak penting dan tidak mendesak salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Negara kepada belanja penanganan pandemic Covid-19 dan belanja peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah perlu untuk melanjutkan reformasi anggaran yang memiliki fokus kepada prioritas rakyat dan orientasi hasil, serta *value for money* dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Efisiensi biaya birokrasi pusat dan daerah, mitigasi terhadap pelbagai kemungkinan dan kebutuhan penting-mendesak, serta memperkuat pondasi ekonomi agar terbebas dari *middle income trap*.
30. Fraksi PKS mencermati pada masa Pandemi banyak negara yang menutup keran ekspor pangannya demi ketahanan pangan negara tersebut. Hal tersebut memberikan sinyal penting kedaulatan dan ketahanan pangan di dalam negeri. Fraksi PKS mengajak seluruh komponen bangsa dan mendorong pemerintah mengambil peluang tersebut sebagai momentum meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan

perbaikan system ketahanan pangan. Tercatat oleh BPS selama tahun 2000 sampai tahun 2018 Impor beras Indonesia mengalami peningkatan yaitu 1,36 juta ton menjadi 2,25 juta ton, di neraca perdagangan tercatat bahwa Indonesia masih melakukan Impor beberapa komoditi pangan seperti biji-bijian termasuk gandum, gula, dan bahkan garam. Pemerintah perlu mencegah terjadinya penurunan lahan pangan dengan pendekatan ekonomi dan sosiologis masyarakat pertanian. Indonesia perlu memperbaiki infrastruktur pertanian bagi ketahanan pangan. Proses industrialisasi di sektor manufaktur perlu diiringi dengan sepadan di pembangunan dan industrialisasi pertanian. Belanja untuk ketahanan pangan tidak hanya berhenti kepada penyediaan infrastruktur pembangunan bendungan, saluran irigasi tapi juga menyentuh kepada infrastruktur perbenihan, permodalan, penguatan institusi pertanian di masyarakat dan pelibatan atau partisipasi masyarakat pertanian.

31. Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar mendesign pembangunan infrastruktur pertanian terkoneksi dengan infrastruktur lainnya. Hal tersebut penting agar dapat mendukung rantai pasokan (*supply chain*) menjadi efisien dan ekonomis untuk ketahanan pangan Indonesia yang berdaulat dan *sustainable*. Fraksi PKS berpandangan bahwa *Grand design* dan *Road Map* kedaulatan pangan dan ketahanan pangan perlu disiapkan agar para petani dan nelayan Indonesia bangga menjadi petani dan nelayan serta merasa setara dengan profesi lainnya yang mempunyai kontribusi besar terhadap kedaulatan dan pembangunan di republik tercinta. Fraksi PKS merisaukan terjadinya degradasi penurunan produksi pangan karena petani dan generasi penerusnya kurang tertarik bertani karena pendapatan dari petani rendah, sangat tergantung iklim, dan banyak ketidakpastian. Fraksi PKS menyayangkan beberapa Indikator kesejahteraan sektor pertanian kenyataannya cenderung belum terjadi perbaikan yang signifikan. Misalnya NTP (Nilai Tukar Petani) yang tidak kunjung membaik, upah buruh di sektor pertanian juga tumbuh lebih rendah dibandingkan pergerakan inflasi nasional maupun inflasi pedesaan. *Grand Design* dan *Road Map* menjadi penting agar produk-produk pangan dari sektor pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan Indonesia dapat berdaya saing dengan produk-produk impor. Pelaksanaan *Grand Design* kedaulatan pangan juga dapat membantu mengurangi persoalan defisit neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri Indonesia. Selain itu, menegakan kedaulatan pangan dari sektor pertanian berkontribusi signifikan dalam PDB nasional, penyerap tenaga kerja tertinggi, dan tempat sebagian besar orang miskin berada.

32. Fraksi PKS secara umum mendorong agar kualitas dan kuantitas belanja kesehatan dijaga secara konsisten memenuhi amanat Undang-Undang Kesehatan. Fraksi PKS mengingatkan bahwa Pemerintah masih perlu menyelesaikan pelbagai masalah yang terjadi di dalam sistem kesehatan Indonesia. Pemerintah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait penyelenggaraan JKN, pelaksanaan rekomendasi BPKP, reformulasi kebijakan, system layanan, iuran, dan manfaat dengan melibatkan lintas K/L. Defisit BPJS yang masih terjadi menandakan pengelolaan keuangan BPJS masih tidak baik. Pemberian tunjangan dan bonus manajemen dan pengawas seharusnya diberikan berdasarkan kinerja prestasi dan kelayakan serta mempertimbangkan *sense of crisis*. Sehingga peningkatan iuran BPJS yang memberatkan masyarakat jangan sampai terjadi lagi. Fraksi PKS mendesak Pemerintah agar tidak lagi menaikkan iuran BPJS, terlebih di masa pandemi ini. Sistem rujukan berjenjang yang saat ini diterapkan BPJS Kesehatan jangan sampai merugikan masyarakat. Alur administrasi yang Panjang dan beberapa berbelit-belit berdampak berantakannya rekam jejak medis pasien dan terlebih lagi jika terdapat perombakan layanan rumah sakit. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan regulasi terkait BPJS, termasuk sistem pendataan kepesertaan gratis, sistem pelayanan, termasuk pembiayaannya sehingga tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Sebagaimana amanah undang undang bahwa setiap warga negara tidak peduli kaya atau miskin berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Pemerintah perlu mempercepat pembenahan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih kurang memadai serta memenuhi kekurangan infrastruktur layanan dan SDM kesehatan secara luas. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) harus berjalan secara sehat dan berkelanjutan, termasuk untuk jaminan Ketenagakerjaan. Pemerintah masih belum bersungguh-sungguh menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental dalam implementasi JKN. Defisit BPJS yang terus menerus adalah indikasi lemahnya manajemen pemerintah dalam pelaksanaan JKN. BPJS perlu meningkatkan dan menjaga transparansi pengelolaan dana iuran kepada publik.
33. Fraksi PKS sangat prihatin dengan meluasnya Pandemi Covid-19, namun Pandemi Covid-19 menyadarkan kepada kita betapa pentingnya Infrastruktur Kesehatan dan Sistem Kesehatan Nasional yang terintegrasi. Fraksi PKS mendesak pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 perlu untuk mengadopsi *knowledge-based policy making* yang juga melibatkan para pakar dan ahli di bidang kesehatan. Krisis kesehatan secara langsung tidak hanya berdampak kepada ekonomi pada saat ini, namun juga dapat berdampak pada jangka panjang. Sehingga pemerintah perlu untuk mengambil tindakan terukur dalam rangka memperkuat infrastruktur kesehatan dan risiko krisis

yang mengikuti. Fraksi PKS memberikan perhatian khusus terkait dengan Alokasi anggaran Belanja kesehatan penanganan Covid-19. Pemerintah perlu mempertimbangkan data epidemiologis terdiri penambahan kasus harian, pendataan karakteristik pasien yang terkena Covid-19, kesiapan sistem kesehatan, dan *surveilans* kasus Covid-19. Termasuk Jumlah pasien dalam pengawasan, kasus positif dan kematian, jumlah ventilator dan alat pelindung diri sebagai faktor kesiapan fasilitas kesehatan penanganan Covid-19. Fraksi PKS prihatin terkait kemampuan pengujian Tes *Polymerase Chain Reaction* Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Malaysia dan Singapura. Indonesia per 29 Mei 2020 baru mencapai 205.250 spesimen, sedangkan Singapura sudah mencapai 330 ribu tes per 25 Mei 2020. Angka pengujian di Indonesia sekitar 1.100 per 1 juta penduduk, sedangkan Malaysia dan Singapura mencapai 16.083 dan 57.249 per 1 juta penduduk. Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk memastikan prioritas ketersediaan obat-obatan dan vitamin serta masker, alat pelindung diri di dalam negeri dapat diakses oleh tenaga kesehatan dan masyarakat. Mencegah terjadinya penimbunan dan pelarangan ekspor jika dalam negeri masih membutuhkan. Kemudian, Fraksi PKS mengingatkan bahwa kebijakan pelonggaran PSBB dengan hanya pertimbangan ekonomi semata-mata dapat menjadi masalah yang menimbulkan kerugian lebih besar, baik dari sisi kesehatan, sosial dan ekonomi. Biaya ledakan orang sakit akan jauh lebih besar dibandingkan dengan upaya pencegahan. Selanjutnya, Pemerintah juga perlu menyiapkan edukasi dan rekayasa sosial agar masyarakat dapat disiplin menerapkan pola hidup bersih dan menghindari kontak langsung (*physical distancing*) dengan sesama selama pandemi dengan pelbagai pendekatan. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah agar jangan sampai menyia-nyaiakan tenaga kesehatan yang telah bertungkus lumus dalam penanganan Covid-19. Padahal investasi tenaga kesehatan ini membutuhkan sumberdaya, waktu, dan materi yang tidak sedikit. Sehingga pemerintah mengalami deficit good governance.

34. Fraksi PKS mendorong agar pemerintah melakukan penguatan belanja modal. Belanja modal sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan tahun 2020 terus mengalami penurunan baik berdasarkan nominal dan perbandingan terhadap Total PDB. Belanja Modal pada tahun 2019 turun menjadi Rp174,7 triliun (unaudited) yang sebelumnya tahun 2015 sebesar Rp215,4 triliun, sehingga perbandingan terhadap PDB pada 2015 yaitu 1,87 persen turun menjadi 1,10 persen pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan Belanja pembayaran bunga utang pada tahun 2019 dan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 sebesar Rp275,52 triliun dan Rp335,16 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk menambah aset tetap atau investasi negara yang dapat memberikan manfaat lebih sedikit dibandingkan dengan belanja

pembayaran bunga utang. Hal ini dapat memberikan indikasi tidak baiknya perencanaan dan pengelolaan keuangan negara. Pemerintah berpotensi melakukan utang untuk membiayai belanja yang tidak produktif, padahal belanja subsidi sudah dikurangi.

35. Fraksi PKS menggaris bawahi belanja Infrastruktur yang merupakan salah satu belanja modal perlu diarahkan hanya kepada pembangunan infrastruktur yang penting dan mendesak kebutuhannya, serta berdampak luas. Sehingga hasil dari pembangunan infrastruktur dapat langsung dioptimalkan penggunaannya, di antaranya seperti pembangunan infrastruktur pertanian terutama pembangunan irigasi dan jaringan irigasi pertanian. Selain itu, Pemerintah juga perlu melakukan investasi infrastruktur kelautan dalam kerangka rantai pasokan industry maritim yang terintegrasi dengan sistem ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Hal ini jika tercapai maka dapat melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Fraksi PKS mendorong pemerintah kembali fokus pada peningkatan belanja modal untuk tahun 2021 setelah dampak covid-19 mulai mereda. Anggaran infrastruktur menjadi komitmen pemerintah Jokowi sejak awal pemerintah. Dalam perkembangannya, porsi belanja modal terus menurun terhadap belanja pemerintah pusat. Sementara porsi belanja modal terhadap PDB tahun 2020 hanya 0,94 persen. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk meningkatkan belanja modal untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara lain. Pada bagian lain, dengan pengalaman covid-19, Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur untuk sektor kesehatan. Sejak 2015-2019, alokasi belanja modal lebih banyak untuk jalan, irigasi, dan jaringan mencapai 0,6 persen dari PDB.

Fraksi PKS berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur harus menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, infrastruktur tersebut tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi-ekonomi kelas atas. Misalnya, pemerintah harus membangun jalan-jalan ke pusat-pusat kegiatan ekonomi kelas menengah ke bawah seperti pasar tradisional. Selain itu, Fraksi PKS mendesak pemerintah meningkatkan alokasi belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi sehingga pertumbuhan Indonesia bisa inklusif. Apalagi Indonesia saat ini terus berusaha untuk memacu pertumbuhan tinggi agar tidak terjebak pada negara berpendapatan menengah. Peranan infrastruktur tersebut harus mampu mentransformasi ekonomi konsumtif menjadi produktif. Dengan demikian, kebergantungan Indonesia pada faktor produksi asing bisa ditekan.

36. Selanjutnya, Fraksi PKS memandang belanja infrastruktur juga perlu diarahkan untuk meningkatkan integrasi dan konektivitas transportasi masal dengan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan berdampak luas. Alokasi anggaran yang masih bergantung kepada angkutan darat terutama untuk jalan raya atau jalan tol selama ini, perlu disempurnakan dengan meningkatkan alokasi untuk moda kereta api, angkutan laut dan udara. Pemerintah perlu memperhatikan kapasitas lembaga pelaksana belanja infrastruktur agar alokasi untuk infrastruktur yang relatif cukup besar, dapat terserap dengan optimal. Selain itu menjadikan belanja infrastruktur yang jika dibiayai oleh utang menjadi optimal penggunaannya. Terkait dengan belanja infrastruktur pembangunan ibu kota negara, Fraksi PKS berpandangan pada masa di tengah pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi adalah hal yang tidak mendesak, sehingga anggaran belanja negara dapat dioptimalkan kepada belanja yang penting dan mendesak serta berdampak luas.

Fraksi PKS berpendapat agar pemerintah mengkaji ulang penetapan 89 proyek infrastruktur Program Strategis Nasional (PSN) baru yang menelan anggaran sampai Rp1.422 triliun di tengah kondisi pandemi. Fraksi PKS memberikan pandangan agar penetapan PSN berdasarkan kebutuhan yang penting dan mendesak. Kemudian, Fraksi PKS prihatin dengan pelbagai pemberitaan di media mengenai maraknya tenaga kerja asing dalam kerja-kerja pembangunan beberapa proyek di dalam negeri, padahal tenaga kerja lokal (Indonesia) banyak yang membutuhkan pekerjaan dan bisa mengerjakannya. Fraksi PKS menekankan Pemerintah untuk wajib menggunakan tenaga kerja (lokal) Indonesia dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur sebagai salah satu usaha mengurangi jumlah pengangguran.

37. Fraksi PKS menilai Belanja Barang memerlukan penajaman lebih lanjut dan diarahkan kepada belanja negara lainnya yang penting dan mendesak. Pada masa yang diprediksi masih dipengaruhi pandemi Covid-19 maka belanja paket rapat, dan perjalanan dinas yang tidak mendesak dapat dialokasikan kepada belanja lain yang mendesak kebutuhannya. Fraksi PKS juga mendorong agar Belanja Barang diarahkan untuk memprioritaskan penggunaan barang yang diproduksi di dalam negeri. Fraksi PKS menekankan agar belanja barang diupayakan semaksimal mungkin tidak menggunakan barang impor seperti mobil dinas *built up*, sehingga dapat mengurangi defisit di neraca pembayaran. Pemerintah juga perlu menghitung belanja barang beserta dengan depresiasinya agar APBN tahun 2021 menjadi lebih kredibel.
38. Fraksi PKS berpandangan bahwa Pemerintah perlu untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk bantuan sosial, terlebih pada masa yang masih dipengaruhi

oleh Pandemi Covid-19. Pemerintah melalui Keterangan Kementerian Keuangan menyampaikan salah satu Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yaitu dukungan untuk rumah tangga. Namun, Pemerintah tidak menyantumkan besaran anggaran tersebut dalam peraturan seperti Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2020 sehingga dapat menjadi pertanyaan bagi publik terkait dengan komitmen pemerintah. Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) pemerintah yang mengalokasikan dukungan untuk rumah tangga sebesar Rp232,27 triliun masih perlu diperjelas program-programnya. Perubahan yang signifikan dalam kebutuhan anggaran PEN memberikan pandangan bahwa pemerintah belum memiliki data-data yang meyakinkan.

39. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah untuk memonitor dan mengevaluasi efektifitas program perlindungan sosial (*Social Safety Net*) seperti kartu sembako, kartu prakerja, dan PKH (Program Keluarga Harapan). Kemudian, Pemerintah perlu melakukan Integrasi dan sinergi PKH (Program Keluarga Harapan) dan PIP (Program Indonesia Pintar), Subsidi listrik dan LPG, bantuan sosial lainnya. Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk melakukan pelbagai macam perbaikan seperti pembaruan atau perbaikan data, perbaikan mekanisme dan tata kelola agar program dapat tepat sasaran. Pemerintah perlu menyelesaikan masalah yang timbul dari penyaluran bantuan sosial, seperti pencairan dana yang terhambat verifikasi data oleh pemerintah daerah, dan distribusi salah sasaran. Data yang tidak sinkron antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkontribusi terhadap ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan waktu penyaluran. Kerja sama dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah adalah diperlukan agar program menjadi tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Jika diperlukan Pemerintah Pusat perlu untuk memonitoring dan evaluasi melalui lembaga independen pelaksanaan dan penyaluran bantuan sosial, maka hal ini perlu didukung oleh transparansi data penerima Bantuan Sosial. Evaluasi diperlukan untuk melihat efektifitas dan ketepatan sasaran program untuk diperbaiki. Sebagai contoh, salah satu Jaring Pengaman Sosial (JPS) yaitu program Kartu Prakerja yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat khususnya para pekerja formal dan informal yang terkena PHK maupun yang dirumahkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak masalah yang terjadi, khususnya pelatihan online yang dirasa kurang bermanfaat pada masa sekarang (Pandemi). Pemerintah perlu untuk memperluas dan menambah alokasi anggaran program-program pengentasan kemiskinan serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

40. Fraksi PKS memandang secara umum kebijakan belanja subsidi masih harus diperbaiki dan dipastikan agar tepat sasaran dan benar-benar memenuhi kebutuhan mendasar rakyat. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa subsidi adalah salah satu bentuk hadirnya negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan menjaga daya beli masyarakat pada masa-masa susah kini. Pengurangan subsidi pada masa rakyat sedang kesusahan adalah salah satu bentuk lepasnya tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya. Fraksi PKS mendorong agar belanja subsidi efektif tepat sasaran serta efisien pengelolaannya. Fraksi PKS menilai ditengah fluktuatif turunnya harga minyak dunia maka belanja subsidi energi dapat dirasionalisasi jumlah nominalnya tanpa mengurangi besaran jumlah penerima subsidi. Pemerintah seharusnya dapat memastikan tidak ada kenaikan harga energi seperti tarif tenaga listrik, tarif BBM, dan tarif LPG. Pemerintah wajib mempertahankan subsidi tarif listrik 450 VA – 900 VA, subsidi LPG tabung 3 kg, BBM bersubsidi bagi rakyat kecil. Kemudian, Pemerintah perlu menjaga ketersediaan dan akses LPG tabung 3 Kg, BBM bersubsidi yaitu Premium yang sering kali dikeluhkan langka atau sulit ditemukan oleh masyarakat. Sehingga terkadang memaksa masyarakat rentan dan miskin untuk mengkonsumsi BBM jenis pertalite bahkan petramax. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah agar terus menerus memperbaiki tata kelola subsidi energi termasuk melakukan perbaikan kinerja dan efisiensi di PLN dan Pertamina.
41. Fraksi PKS mengingatkan bahwa Pembaruan data dan Perbaikan data untuk belanja subsidi non energi adalah hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus. Alokasi belanja subsidi non energi harus didukung oleh basis data yang *relevance – reliable* dan akuntabel. Subsidi non energi seperti subsidi pupuk, Subsidi Bantuan Uang Muka untuk pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan PSO (*Public Service Obligation*) untuk transportasi dan komunikasi, subsidi bunga KUR untuk UMKM, Penguatan Penjaminan untuk UMKM, serta pelayanan publik lainnya mesti diberikan alokasi anggaran yang cukup dan kebijakan yang tepat. Kebijakan-kebijakan tersebut harus berdasarkan basis data, tata kelola dan mekanisme yang baik agar tepat sasaran dan biaya pelaksanaan subsidi dapat sangat efisien. Fraksi PKS mendukung Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas, memperkuat program program perlindungan sosial dan mendukung peningkatan daya beli masyarakat.
42. Fraksi PKS memberikan perhatian khusus agar pemerintah memperbaiki akurasi data-data sosial di Indonesia agar kebijakan tetap sasaran. Terkait dengan hal tersebut, KPK memberikan acuan untuk pengolaan bantuan sosial yaitu: (i) mengacu Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan awal pendataan di lapangan yang teknisnya dilakukan dengan melibatkan hingga ke satuan kerja terkecil di masyarakat, yaitu RT/RW untuk melakukan perluasan penerima manfaat (non-DTKS) dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; (ii) mendorong keterbukaan data terkait penerima bantuan, realisasi anggaran dan belanja terkait bansos sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas; (iii) kementerian/lembaga/pemda agar menyediakan saluran pengaduan masyarakat (iv) KPK membentuk tim pada Kedeputusan Pencegahan yang bekerja mendampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik di pusat maupun di daerah; dan (v) pendampingan dilakukan KPK bersama-sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian/Lembaga terkait (Bisnis Indonesia, 2020).

43. Selain program subsidi energi untuk rakyat miskin, dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional, Fraksi PKS berpendapat bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan dan pengembangan dalam pemanfaatan EBT (Energi Baru dan Terbarukan). Indonesia memiliki sumber EBT yang sangat melimpah. Fraksi PKS berpendapat bahwa Insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan EBT akan dapat mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan khususnya pembangkit tenaga listrik. Namun, ditengah keterbatasan saat ini, Pemerintah harus kreatif dan inovatif menghadirkan sumber-sumber energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan harga yang terjangkau tanpa mengurangi kedaulatan negara. Fraksi PKS menilai bahwa biaya perolehan EBT jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya relatif semakin murah, pada tahun 2019 harga listrik panel surya berkisar Rp1.209/kWh, Harga listrik Tenaga Panas Bumi Rp1.024/kWh jika dibandingkan dengan Listrik dari minyak dapat mencapai di atas Rp2.000/kWh, dan listrik dari bahan bakar gas Rp1.300 – 1.500 /kWh. Maka, menghadirkan EBT dengan harga yang terjangkau bagi rakyat semakin dapat diupayakan.

Fraksi PKS melihat bahwa upaya meningkatkan penggunaan sumber energi alternatif sangat tepat dilakukan saat ini. Mengingat penurunan harga minyak mentah dunia, yang menjadi sumber utama energi primer di Indonesia. Indonesia harus segera beralih ke sumber energi yang dapat diperbaharui seperti energi bayu. Hal ini sangat penting untuk menjaga agar ekonomi nasional tidak terganggu oleh kenaikan harga minyak ke depan. Selain itu, Rupiah pun akan relatif stabil. Demikian juga defisit neraca transaksi berjalan.

44. Pemerintah perlu menjaga *mandatory spending* anggaran Pendidikan berdasarkan konstitusi sebanyak 20 persen dari APBN dan APBD. Fraksi PKS menyarankan alokasi Anggaran pendidikan tersebut perlu diikuti oleh perbaikan capaian beberapa kinerja dan kualitas seperti *Global Competitiveness Index* terkait human capital, *Human Capital Index*, *Peningkatan kompetensi guru*, dan ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah. Untuk mencapai kualitas tersebut, Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar dapat menjamin ketersediaan gedung sekolah, sarana dan prasarana, dan tenaga pengajar dengan kuantitas yang cukup dan kualitas baik merata di seluruh Indonesia. Sehingga, alokasi anggaran pendidikan yang besar diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas bangsa secara keseluruhan. Namun, kebijakan ini juga perlu didukung dengan program pemenuhan gizi dan jaminan kesehatan yang baik. Dana Abadi Pendidikan seperti Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi tetap dialokasikan sesuai kebutuhan untuk penggunaan fungsi pendidikan. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap keberlangsungan peningkatan kualitas dan daya saing *human capital* Indonesia.
45. Fraksi PKS secara umum mengingatkan dan mendesak Pemerintah agar belanja negara terkait dengan gaji, honor, tunjangan semua guru dialokasikan dalam anggaran sesuai dengan kebutuhannya. Fraksi PKS juga mengingatkan dan mendesak Pemerintah agar Belanja Negara dalam bidang pendidikan tepat sasaran dan tepat waktu pelaksanaannya. Fraksi PKS mendesak agar Tunjangan-Tunjangan Profesi Guru SD melalui DAK non – Fisik seperti Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Khusus Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD agar kembali dialokasikan sesuai kebutuhannya. Sebelumnya melalui PERPRES 54 tahun 2020 Pemerintah menghilangkan alokasi anggaran tunjangan tersebut. Mengingat guru adalah garda terdepan dalam usaha-usaha mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Fraksi PKS memandang bahwa profesi guru dan profesi lainnya adalah profesi yang mulia. Sebagai ilustrasi, jika profesi dokter menjamin kelangsungan hidup manusia, maka profesi guru dapat menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa. Fraksi PKS juga mendorong agar Pagu Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri dialokasikan secara memadai agar biaya kuliah tidak semakin mahal dan dapat terjangkau oleh rakyat miskin. Kemudian, Fraksi PKS juga mengingatkan pemerintah agar Standar biaya dana BOS memperhatikan unsur kemahalan daerah.
46. Fraksi PKS juga mendorong Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bagi pendidikan inklusi atau pendidikan khusus sesuai kebutuhan. Berdasarkan data BPS

(2017) jumlah anak berkebutuhan Khusus di Indonesia adalah sebanyak 1,6 juta orang. Beberapa laporan di media menyatakan bahwa hasil pendataan siswa penyandang disabilitas di sekolah inklusif masih sedikit pada tahun 2019. Fraksi PKS menilai bahwa kurangnya aksesibilitas terhadap pendidikan khusus dan rendahnya jumlah Anak Berkebutuhan Khusus memperoleh pendidikan di antaranya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya infrastruktur sekolah yang memadai, kurangnya tenaga pengajar khusus, dan juga stigma masyarakat terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. Kemudian, faktor yang sangat penting sebagai bentuk afirmasi adalah kurangnya regulasi yang mendukung terhadap pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk dapat menyiapkan regulasi yang mendukung, serta berperan aktif melakukan pendataan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar Anak Berkebutuhan Khusus dapat terlepas dari stigma dan juga menerima haknya untuk mendapatkan pendidikan.

47. Fraksi PKS mendorong agar Belanja pendidikan mendorong dunia pendidikan untuk *link and match* dengan kebutuhan dunia bisnis dan industri. Pemerintah perlu menyiapkan *road map* dan *grand design* agar dunia pendidikan juga dapat mengisi kebutuhan dunia industri, tanpa mengesampingkan peran dunia pendidikan sebagai penjaga moral dan intelektual bangsa. Penguatan industrialisasi dan pendalaman struktur industri memerlukan kesepaduan kebijakan dan output antara dunia pendidikan dan arah kebutuhan industri, sehingga industri tidak kesusahan mencari Modal Manusia dengan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*expertise*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) tertentu dan masyarakat tidak susah mencari pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan. Kebijakan ini juga dapat menghindari terjadinya *brain drain* di Indonesia. Penguatan *link and match* dengan Industri memerlukan dukungan seperti penguatan dalam kesesuaian kurikulum, kualitas tenaga pengajar, *research development* dan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga. Dunia pendidikan Indonesia harus diarahkan untuk dapat mengikuti bahkan menciptakan perkembangan sains dan teknologi dunia yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kepentingan rakyat.
48. Undang-Undang SISNAS IPTEK (Sistem Nasional Ilmu pengetahuan dan Teknologi) yang menjadi modal bagi penciptaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah disahkan. Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk segera menyiapkan aturan pelaksana dan aturan pendukung mengenai Undang-Undang SISNAS IPTEK agar pengurusan sumber daya IPTEK dapat segera terencana dan terintegrasi. Pemerintah harus lebih serius dalam kebijakan penciptaan dan pengembangan

teknologi, karena politik anggaran sudah jelas dan dana abadi riset sudah ditetapkan. Merujuk laporan *Global R&D Funding Forecast (2018)* bahwa dana riset Indonesia adalah kurang dari 1 persen dari PDB. Angka ini masih terbelang jauh dari Jepang dan Cina yang rela mengucurkan 3,55 persen dan 1,94 persen dari PDB mereka.

49. Fraksi PKS berpendapat jika pemerintah serius untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945, maka dukungan dana untuk riset perlu diprioritaskan dan mengkaji ulang penetapan 89 proyek infrastruktur Program Strategis Nasional (PSN) baru yang menelan anggaran sampai Rp1.422 triliun di tengah kondisi pandemi. Penetapan proyek Infrastruktur PSN mesti dinilai berdasarkan pertimbangan penting dan mendesak serta memiliki dampak langsung kepada masyarakat luas. Berkurangnya dana riset dan penelitian akan berpengaruh terhadap penciptaan inovasi produk. Pengembangan riset dan penelitian dapat memberikan nilai tambah sistem produksi dan konsumsi Indonesia pada masa depan di tengah era industri 4.0 dan nano teknologi (termasuk *artificial intelligent*). Penguatan industri dan pendalaman struktur Industri didukung oleh *human capital* dan *research development* yang berkualitas tinggi dapat menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru dan sektor pertumbuhan ekonomi baru berdaya saing global. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk menyiapkan Modal Manusia yang terlatih, terampil, dan pakar pencipta untuk menjawab tantangan dunia digital.
50. Fraksi PKS berpandangan agar Anggaran Belanja perlu diarahkan untuk peningkatan kekuatan pertahanan dengan melanjutkan pemenuhan kekuatan dasar (*Minimum Essential Force*) untuk merespon tantangan perkembangan geopolitik kawasan dan lingkungan strategis yang dinamis. Alokasi anggaran pertahanan harus berdampak langsung terutama terhadap kesejahteraan prajurit, industri pertahanan dan alutsista dalam negeri. Pemerintah perlu mendorong agar kesejahteraan para prajurit TNI juga dapat ditingkatkan terutama yang menjalankan pengabdian di daerah terpencil dan perbatasan-perbatasan negara. Secara khusus, Pemerintah perlu keseriusan untuk membangun industri pertahanan dan alutsista dalam negeri agar pemenuhan kebutuhan pertahanan Indonesia dapat mulai mandiri. Kemudian, anggaran fungsi pertahanan juga perlu dipertimbangkan untuk dialokasikan merespon ancaman-ancaman pertahanan *non-traditional* seperti kelangkaan sumber daya, *economic warfare* dan ancaman penyakit menular. Fraksi PKS memahami sekali bahwa dibalik diplomasi negara yang unggul didukung oleh pertahanan negara yang kuat.
51. Fraksi PKS mengingatkan dan mendesak Pemerintah untuk menguatkan Koperasi dan UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. UMKM dan Koperasi adalah bagian penting

dari perekonomian yang menopang sektor riil di Indonesia, mestinya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendapatkan porsi anggaran yang seharusnya mengalami peningkatan sesuai dengan tanggung jawabnya terhadap Koperasi dan UMKM. Potensi tenaga kerja Indonesia yang terserap dalam sektor UMKM sangatlah besar, yakni sebanyak 117 juta tenaga kerja atau sebanyak 97 % dari total tenaga kerja Indonesia. Pada kenyataannya, alokasi anggaran belanja Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 berada di posisi ke 52 sebesar Rp743,24 miliar dari keseluruhan alokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.851 triliun dan hanya 0,03 persen dari total Belanja Negara yaitu Rp2.613,8 triliun. Fraksi PKS berpendapat bahwa Koperasi dan UMKM, bersama-sama dengan dunia industri (termasuk industri keuangan) dan dunia pendidikan harus menjalin kerja sama agar dapat saling menguatkan. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong agar pemerintah menyiapkan *road map* dan *grand design* untuk mencapai hal tersebut.

52. Fraksi PKS berpandangan terkait dengan Tenaga Kerja, Pemerintah harus serius memberikan jaminan perlindungan yang kuat terhadap nasib tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Terkait dengan persoalan tenaga kerja di dalam negeri, Fraksi PKS menilai ada beberapa peraturan yang perlu dievaluasi oleh pemerintah di antaranya Peraturan Presiden nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mempermudah prosedur administrasi bagi tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Kebijakan bebas visa berdasarkan Peraturan Presiden nomor 69 Tahun 2015 (45 negara) dan Peraturan Presiden nomor 21 Tahun 2016 untuk 169 negara. Kebijakan tersebut diduga sebagai pintu masuk bagi masuknya Tenaga Kerja Asing Ilegal. Terakhir, adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 yang menghapus kewajiban Tenaga Kerja Asing untuk bisa berbahasa Indonesia. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah jangan sampai salah dalam menganalisa akar masalah hanya untuk alasan mendongkrak investasi besar, sementara di sisi lain pemerintah seolah tidak memberikan perlindungan kepada tenaga kerja di dalam negeri. Sementara ini, Fraksi PKS menilai Pemerintah tidak mampu melindungi warganya baik sebagai tenaga kerja di dalam negeri, maupun pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Pemerintah memberikan privilege terhadap TKA dengan alasan kompetensi yang tidak dimiliki anak bangsa sendiri. Di Luar Negeri, tercatat hanya 12 negara penempatan yang memiliki atase ketenagakerjaan. Ini persoalan nasionalisme dan marwah bangsa.

53. Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah untuk berhati-hati dengan pengelolaan utang negara. Alokasi anggaran pembayaran bunga utang negara Persentase pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara semakin meningkat, pada tahun 2015 sebesar 10,43 persen kemudian meningkat menjadi 19,04 persen pada tahun 2020. Hal ini memberikan indikasi bahwa kemampuan penerimaan dalam negeri untuk menyelesaikan pembayaran bunga utang menjadi berkurang. Fraksi PKS merisaukan risiko masuknya Indonesia dalam jebakan utang (*debt trap*) karena pemerintah berutang hanya untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang sebelumnya. Tercatat dari laporan pemerintah bahwa Pembayaran bunga utang pada tahun 2015 sebesar Rp156,01 triliun meningkat menjadi Rp335,16 triliun pada tahun 2020. Fraksi PKS memandang, kebijakan utang pemerintah harus dikaji lebih mendalam, mengingat realisasi serapan anggaran yang juga tidak optimal dan defisit APBN yang masih bersifat tidak produktif. Jangan sampai pemerintah berutang namun utang tersebut tidak digunakan tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran, sehingga negara berutang hanya untuk membayar pokok utang dan bunga utang. Pada masa pandemi ini, Fraksi PKS juga mengingatkan pemerintah agar kebijakan utang hanya untuk kebutuhan yang penting dan mendesak. Utang pemerintah digunakan untuk belanja negara yang produktif dan berimpak ke masyarakat luas. Fraksi PKS juga merisaukan kondisi utang BUMN yang semakin meningkat dan akan jatuh tempo. Kondisi utang BUMN yang terus meningkat dan jatuh tempo jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi masalah bagi BUMN, yang pada akhirnya dikhawatirkan bisa menjadi beban berupa belanja negara untuk menutup kewajiban BUMN.

Fraksi PKS menilai beban keuangan negara semakin berat ke depan. Persoalan yang paling mendasar muncul dari kegagalan pemerintah mencapai target-target penerimaan negara. Saat krisis Covid-19 meluas, kondisi semakin buruk dan memaksa pemerintah membuka rambu-rambu fiskal yang selama ini dijaga. Salah satu dan yang paling utama adalah pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen dan tidak ditetapkan batasannya. Hal tersebut telah menumpuk beban bunga utang. Sementara itu, *tax ratio* terus menurun dan hanya diprediksi 8-9 persen. Pada 2020 pembayaran bunga utang mencapai Rp338 triliun naik 22 persen (yoy). Angka tersebut mencakup 2 persen dari PDB dan 20 persen terhadap penerimaan negara.

54. Fraksi PKS mendesak Pemerintah agar menyelesaikan temuan-temuan BPK semester II tahun 2019. Berdasarkan IHPS Semester II 2019 rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK di Pemerintah Pusat terdapat 1.113 permasalahan, lalu di BUMN dan badan lainnya terdapat 5.480 permasalahan dengan nilai masing-masing sebesar Rp4,89 triliun dan

Rp1,25 triliun. Permasalahan tersebut di antaranya adalah kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Berdasarkan temuan tersebut, Fraksi PKS mengingatkan pemerintah agar pengelolaan belanja negara tahun 2021 dapat digunakan dengan hemat, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah perlu memperbaiki tata kelola keuangan untuk belanja negara.

Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan kementerian dan lembaga. Menurut audit BPK, ditemukan ketidakefisienan dan ketidakhematan. BPK mencatat 4.094 temuan yang memuat 5.480 permasalahan. Laporan tersebut menyebutkan tren tata kelola keuangan yang tidak efisien dan tidak hemat cenderung mengalami kenaikan. Sebanyak 18 persen merupakan masalah SPI; 31 persen masalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 51 persen adalah Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II/2019 masalah ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan menyebabkan berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp6,25 triliun. Sementara itu masalah ketidakefisienan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan, berpotensi merugikan negara hingga Rp1,35 triliun.

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

55. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka melakukan berbagai langkah penghematan melalui pemotongan dan realokasi anggaran TKDD jangan sampai mengganggu program utama pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor produktif. Mengingat dampak pandemi Covid-19 pasti dirasakan oleh semua daerah di Indonesia. Fraksi PKS memandang pentingnya penguatan perencanaan, arahan yang jelas, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan TKDD antar Kementerian atau Lembaga serta unit terkait yang bertanggung jawab.
56. Fraksi PKS juga melihat pentingnya program ketahanan pangan daerah menuju swasembada pangan masing-masing daerah penting untuk segera direalisasikan guna menjamin ketersediaan dan kecukupan bahan pangan yang berkualitas. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir ketergantungan terhadap bahan pangan impor. Dukungan transfer ke daerah maupun pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan

produksi hasil pertanian utamanya pada daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan nasional dan daerah-daerah yang potensial menjadi lumbung pangan baru di masa mendatang. Fraksi PKS memandang Transfer ke Daerah dan Dana Desa seharusnya mampu membangun kemandirian desa utamanya ketahanan/kemandirian pangan.

57. Fraksi PKS memandang kualitas pengawasan menjadi sangat penting sebagai upaya peningkatan perekonomian desa melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), produk unggulan desa, dan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat desa dalam berusaha. Sinergi pengembangan desa melalui pola kemitraan dengan dunia usaha, penguatan kapasitas SDM desa, koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar tingkat pemerintahan juga harus ditingkatkan. Dorongan dan dukungan penuh terhadap sektor produksi dan ekonomi kreatif baik industri rumah tangga maupun UMKM juga menjadi sarana meningkatkan kualitas wirausaha dan juga dalam rangka menciptakan wirausaha baru sebagai penopang ekonomi kerakyatan. Fraksi PKS juga memandang pentingnya pemanfaatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk membangun kemandirian desa terkait kesehatan dengan basis UKBM (Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat).
58. Fraksi PKS memandang kualitas pengawasan menjadi sangat penting sebagai upaya peningkatan perekonomian desa melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), produk unggulan desa, dan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat desa dalam berusaha. Sinergi pengembangan desa melalui pola kemitraan dengan dunia usaha, penguatan kapasitas SDM desa, koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar tingkat pemerintahan juga harus ditingkatkan. Dorongan dan dukungan penuh terhadap sektor produksi dan ekonomi kreatif baik industri rumah tangga maupun UMKM juga menjadi sarana meningkatkan kualitas wirausaha dan juga dalam rangka menciptakan wirausaha baru sebagai penopang ekonomi kerakyatan.
59. Fraksi PKS memandang bahwa aspek kemiskinan dan kinerja desa harus tetap diperhatikan mengingat Dana Desa sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki kualitas dan pemerataan pelayanan publik antar desa, memajukan perekonomian desa, dan mengurangi kemiskinan. Selanjutnya adalah pengawasan penggunaan Dana Desa, sehingga aspek kemiskinan dan kinerja tepat sasaran serta tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Fraksi PKS mengapresiasi adanya pemberian reward atas kinerja daerah/desa, berkinerja baik atau bahkan Desa berstatus Mandiri. Fraksi PKS memandang pentingnya sosialisasi dan pemahaman persepsi pemangku otoritas daerah/desa

terkait sistem penilaian dan pengawasan pemberian reward dan punishment. Khusus untuk punishment dimana Kemenkeu dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa atau hal lainnya, juga harus benar-benar memperhatikan standar operasional prosedur yang berlaku. Ini sangat penting untuk meminimalisir semakin besarnya ketimpangan antar daerah/desa.

60. Fraksi PKS memandang Dana Desa yang memadai sangat dibutuhkan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat desa. Peningkatan Dana Desa sangat penting dan pelaksanaannya yang akuntabel akan berdampak signifikan pada pembangunan desa, kesejahteraan rakyat serta penciptaan lapangan kerja dipelosok-pelosok desa. Fraksi PKS mendorong agar alokasi Dana Desa juga diprioritaskan untuk fungsi ekonomi produktif lebih besar dibanding dengan infrastruktur fisik. Fraksi PKS berpandangan bahwa alokasi Dana Desa perlu ditingkatkan secara lebih signifikan dan didukung sistem akuntabilitas yang baik, agar berdampak pada pembangunan desa dan penciptaan lapangan kerja dipelosok-pelosok desa.
61. Fraksi PKS selalu mengingatkan pentingnya kepastian pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan publik selain harus adil, juga harus mengutamakan prinsip kehati-hatian sebagai syarat utama mewujudkan keuangan publik yang berkualitas. Prioritas pada pembangunan manusia, infrastruktur, pengembangan potensi unggulan daerah dan meningkatkan ekonomi kerakyatan diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan di masyarakat desa pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk itu, pengelolaan keuangan publik yang berkualitas harus mencakup pengelolaan keuangan negara dan daerah yang adil, sehat, mandiri, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kebijakan Defisit dan Pembiayaan

62. Fraksi PKS mencermati defisit APBN dalam postur anggaran 2021 diproyeksikan sebesar 3,21-4,17 persen dari PDB. Besaran defisit yang melebihi angka 3 persen dari PDB tersebut merupakan bagian dari implementasi Perppu No. 1 tahun 2020. Namun demikian, Fraksi PKS memandang nilai tersebut belum mencerminkan hasil kajian mendalam dalam penetapan proyeksi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, defisit anggaran tidak mampu menjadi pendorong tercapainya angka pertumbuhan ekonomi

yang ditargetkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kualitas belanja pemerintah yang rendah. Sebagai catatan bahwa rata-rata belanja modal pada APBN hanya mencapai 11 persen, lebih rendah dari belanja rutin yang sifatnya konsumtif mencapai 12 persen ataupun belanja bunga utang yang mencapai 17 persen. Pelebaran defisit anggaran yang tidak dibarengi dengan belanja yang optimal dan produktif, akan menimbulkan masalah baru bagi perekonomian Indonesia, yaitu timbulnya beban utang atas Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SILPA) atau dengan kata lain adanya beban utang atas likuiditas yang *idle*.

Fraksi PKS juga mendesak Pemerintah untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan realisasi program. Hal ini tercermin dari defisit sebelumnya tidak terencana dengan baik dan terbukti anggaran tidak terserap dengan baik, sehingga SILPA Pemerintah cukup besar. Dengan besarnya SILPA artinya negara merugi karena sudah berutang tetapi tidak digunakan. Akibatnya selain sudah menanggung beban bunga yang ada, kita kehilangan peluang (*missed opportunity*) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja Pemerintah.

63. Fraksi PKS berpandangan bahwa struktur pembiayaan anggaran yang bersifat rentan terhadap adanya *crowding out effect* dan memerlukan biaya yang tinggi. Pada masa sekarang, defisit anggaran sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Tercatat bahwa kepemilikan asing atas SUN mencapai lebih dari 40 persen sehingga hal tersebut berisiko adanya *sudden capital outflow* (keluarnya aliran modal secara tiba-tiba). Pada akhirnya untuk menjaga daya tarik investor, Pemerintah meningkatkan imbal hasil *yield* pada SUN yang diterbitkan. *Multiplier effect* yang muncul adalah respon dari pihak swasta dengan meningkatkan imbal hasil yang lebih tinggi agar dapat bersaing dengan SUN, sehingga *cost of fund* untuk ekspansi swasta menjadi lebih mahal.
64. Seiring dengan kebijakan relaksasi anggaran, estimasi utang pada APBN 2021 diperkirakan sebesar 36,67-37,97 persen dari PDB, angka ini melonjak dari realisasi utang tahun 2019 sebesar 30,18 persen dari PDB serta sampai dengan Maret 2020 dilaporkan bahwa utang negara telah mencapai 32,52 persen dari PDB. Pada faktanya selama lima tahun terakhir sebelum adanya pandemi, perekonomian Indonesia telah menunjukkan adanya tren kenaikan rasio utang terhadap PDB. Oleh karena itu, Fraksi PKS berpandangan bahwa kinerja Pemerintah dalam pengelolaan utang pemerintah dinilai kurang efektif untuk menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal. Pengelolaan utang masih mengesampingkan manajemen risiko keuangan Negara dan penerapan *Fiscal Sustainability Analysis* (FSA) termasuk *Debt*

Sustainability Analysis (DSA) secara komprehensif. Sebagai catatan penting bahwa rasio utang tersebut belum termasuk utang-utang BUMN yang dimiliki secara penuh oleh Negara, sebagai contoh PLN dengan total utang Rp394,18 triliun pada 2019.

65. Fraksi PKS menilai Pemerintah belum memiliki parameter dan indikator yang memadai untuk mengukur pencapaian pemanfaatan utang sehingga dapat dinilai produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya laporan pertanggungjawaban atas kebijakan pemanfaatan utang. Selain itu, dalam hal ini definisi 'produktif dalam pemanfaatan utang' belum diungkapkan secara jelas dalam dokumen perencanaan pemerintah. Pada masa pandemi, Fraksi PKS berpendapat bahwa menyoroti kenaikan signifikan utang pemerintah adalah hal yang penting dan *urgent*. Hal ini terkait dengan kepastian tidak adanya penggunaan dari penambahan utang untuk hal di luar penanganan pandemi Covid-19 dan stabilisasi ekonomi nasional. Utang dan penambahan utang membawa konsekuensi kewajiban pembayaran bunga utang untuk masa yang panjang dan pada akhirnya akan membebani rakyat.
66. Keseimbangan primer tahun 2021 masih diestimasi defisit yaitu sebesar 1,24-2,07 persen dari PDB, meskipun angka yang disajikan lebih baik dari Perubahan APBN tahun 2020 yang defisit sebesar 3,08 persen dari PDB, Fraksi PKS berpandangan bahwa Pemerintah harus lebih fokus pada usaha mencapai ketahanan anggaran, karena selama ini tidak mampu membayar kewajiban, terutama utang, menggunakan penerimaan negara melainkan dengan menerbitkan utang baru. Fraksi PKS mendorong Pemerintah agar lebih bekerja keras dalam upaya meningkatkan pendapatan negara baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. Atas perhatian Bapak/Ibu menyimak dan mendengarkan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami ucapkan terima kasih.

***Wallahu muwafiq ila aqwamith thoriq, billahi taufiq wal hidayah,
Wassalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Jakarta, 23 Syawal 1441 H

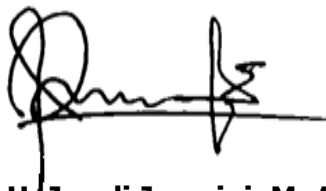
15 Juni 2020 M

PIMPINAN

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua



Dr. H. Jazuli Juwaini, M. A.

A-449

Sekretaris



Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T.

A-427